

PETA JALAN REFORMASI POLRI SEJAK PEMISAHAN DARI ABRI/TNI

Oleh:

Tim SCP - Center for Strategic Policing

Jakarta, 2025

Daftar Isi

I. Pendahuluan	1
Latar Belakang Pemisahan dari ABRI	1
Tujuan Reformasi Polri.....	1
II. Periode Reformasi Polri.....	3
A. Renstra Polri 1999–2004: Fase Awal Kemandirian.....	3
B. Renstra Polri 2005–2009: Konsolidasi Kelembagaan.....	6
C. Renstra Polri 2010–2014: Modernisasi & Ujian Akuntabilitas	11
D. Renstra Polri 2015–2019: “Promoter” (Profesional, Modern, Terpercaya)	16
E. Renstra Polri 2020–2024: Transformasi “Presisi”	19
III. Analisis Menyeluruh Transformasi Polri (1999–2024)	26
A. Pola Keberhasilan.....	26
B. Pola Kegagalan yang Berulang.....	27
C. Faktor Internal dan Eksternal	28
D. Analisis SWOT Polri (2000–2025).....	29
E. Kesimpulan Analisis.....	32
IV. Kondisi Umum Indonesia 2025 (Pemotretan Singkat)	33
A. Politik & Pemerintahan	33

B. Ekonomi	34
C. Keamanan dan Ketertiban.....	34
D. Kepercayaan Publik & Persepsi	35
E. Fokus Prioritas Pemerintah & Isu Keamanan .	36
F. Tantangan Spesifik bagi Polri di 2025	36
V. Analisis Renstra Polri 2025-2029	38
A. Pokok-pokok Isi Renstra	38
B. Pola Keberhasilan yang Diharapkan	39
C. Pola Risiko dan Kegagalan yang Perlu Diwaspadai.....	40
D. Faktor Internal dan Eksternal yang Akan Menentukan Keberhasilan Renstra 2025-2029	42
E. Kesimpulan / Rekomendasi Strategis	43
Peta Jalan Reformasi Polri 2025–2045	45

I. Pendahuluan

Latar Belakang Pemisahan dari ABRI

Pemisahan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan salah satu tonggak penting dalam agenda reformasi pasca-1998. Keputusan ini lahir melalui Tap MPR No. VI/MPR/2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 yang menegaskan perlunya pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan. Sejak saat itu, TNI difokuskan pada fungsi pertahanan negara, sedangkan Polri diarahkan sebagai lembaga sipil yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemisahan ini bukan sekadar perubahan struktural, tetapi juga merupakan koreksi terhadap praktik-praktik masa lalu yang sering kali bercampur antara kepentingan pertahanan dan keamanan domestik.

Tujuan Reformasi Polri

Reformasi Polri memiliki tujuan strategis untuk membentuk kepolisian yang profesional, modern, dan dipercaya masyarakat. Visi utama reformasi adalah mengubah wajah Polri dari institusi dengan kultur militeristik menuju lembaga sipil yang berorientasi

pada pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, reformasi Polri diharapkan mampu:

- 1. Menegaskan identitas sebagai aparat sipil** yang netral dari kepentingan politik praktis.
- 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi**, baik dalam proses penegakan hukum maupun pelayanan publik.
- 3. Mendorong modernisasi kelembagaan dan teknologi**, agar mampu merespons tantangan keamanan yang semakin kompleks.
- 4. Membangun kepercayaan masyarakat**, sehingga Polri benar-benar hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat, bukan alat kekuasaan.

Transformasi ini menjadi landasan penting bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Polri dalam setiap periode, yang secara bertahap mengarahkan perubahan institusional menuju kepolisian yang sesuai dengan tuntutan demokrasi dan perkembangan zaman.

II. Periode Reformasi Polri

A. Renstra Polri 1999–2004: Fase Awal Kemandirian

1. Kapolri:

- Jenderal (Pol) Roesmanhadi (1998–2000) → Kapolri terakhir di bawah ABRI.
- Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro (2000–2001) → awal pemisahan Polri dari ABRI.
- Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar (2001–2005) → menata struktur Polri mandiri.

2. Konteks Sosial Politik

- 1 April 1999 → Polri resmi dipisahkan dari ABRI.
- 2002 → Lahir UU No. 2 Tahun 2002 sebagai payung hukum Polri.
- Indonesia mengalami konflik bersenjata & komunal:
 - Timor Timur (1999) → pasca jajak pendapat, kekerasan meningkat; Polri bersama TNI dituding gagal mencegah kerusuhan.
 - Ambon (1999–2002) → lebih dari 5.000 orang tewas, ratusan ribu mengungsi.
 - Poso (1998–2001) → konflik agama, menelan korban sekitar 1.000 orang tewas.
 - Aceh → operasi keamanan menghadapi GAM meningkat, ribuan warga sipil jadi korban.

3. Arah Kebijakan dalam Renstra

- Menegakkan fungsi keamanan internal → penegakan hukum, pelayanan, perlindungan masyarakat.
- Membangun identitas sipil Polri (terlepas dari doktrin militer).
- Restrukturisasi organisasi: Polri dipimpin Kapolri, terpisah dari TNI.

4. Keberhasilan

1. Landasan hukum kuat → UU No. 2/2002 mengukuhkan posisi Polri.
2. Restrukturisasi kelembagaan: pembentukan Polda, Polres, Polsek dengan sistem komando langsung Kapolri.
3. Netralitas di Pemilu 1999 & 2004 → meski ada catatan miring, Polri relatif mampu menjaga proses demokrasi.
4. Pembentukan Densus 88 (2003) → respons atas Bom Bali I (2002) yang menewaskan 202 orang, ini awal kemampuan kontra-terorisme Polri diakui dunia.
5. Penguatan pendidikan HAM → mulai diintegrasikan dalam kurikulum kepolisian.

5. Tantangan / Kelemahan

1. Citra publik buruk: survei awal 2000-an (misalnya Lembaga Survei Indonesia 2003) menempatkan Polri di antara institusi paling tidak dipercaya publik.

2. Kekerasan aparat: Amnesty International & HRW mencatat pelanggaran HAM Polri di Aceh dan Papua, termasuk penyiksaan dan penembakan di luar hukum.
3. Keterbatasan teknologi: sistem forensik, data kriminal, dan peralatan minim → investigasi sering gagal.
4. Kasus besar → misalnya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir (2004), penyelidikan Polri dinilai lamban dan tidak tuntas.
5. Korupsi & pungli masih merajalela di tingkat operasional (SIM, tilang, dll).

6. Analisis

Fase awal kemandirian Polri (1999–2004) memperlihatkan dinamika yang kompleks antara capaian kelembagaan dan keterbatasan struktural. Di satu sisi, lahirnya **UU No. 2 Tahun 2002** serta restrukturisasi organisasi berhasil menegaskan posisi Polri sebagai lembaga sipil dengan mandat keamanan dalam negeri. Keberhasilan menjaga netralitas pada Pemilu 1999 dan 2004, serta pembentukan **Densus 88** sebagai respons atas ancaman terorisme global, menunjukkan kemampuan adaptasi Polri terhadap kebutuhan keamanan baru.

Namun di sisi lain, kelemahan mendasar masih tampak jelas. **Budaya kekerasan dan pelanggaran HAM** yang diwarisi dari masa sebelumnya sulit dihapus, terutama dalam operasi di Aceh dan Papua. Rendahnya **kepercayaan publik** pada awal 2000-an juga menegaskan bahwa reformasi hukum dan

restrukturisasi kelembagaan belum sepenuhnya menyentuh aspek budaya organisasi dan etika profesi. Keterbatasan teknologi, lemahnya investigasi kasus besar seperti pembunuhan Munir, serta praktik korupsi di tingkat pelayanan menambah citra negatif yang sulit dipulihkan.

Dengan demikian, fase ini bisa dibaca sebagai **periode transisi** yang menegaskan identitas Polri sebagai lembaga sipil, tetapi belum mampu melepaskan diri dari warisan militeristik dan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Momentum penanganan konflik komunal dan terorisme sebetulnya membuka jalan bagi modernisasi, tetapi juga menyoroti urgensi reformasi yang lebih mendalam pada aspek budaya, transparansi, dan profesionalisme.

B. Renstra Polri 2005–2009: Konsolidasi Kelembagaan

1. Kapolri:

- Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar (hingga Juli 2005).
- Jenderal (Pol) Sutanto (2005–2008) → dorong pembenahan internal & pemberantasan narkoba.
- Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (2008–2010) → fokus kontra-terorisme, pengamanan pemilu.

2. Konteks Sosial Politik

- Indonesia mulai lebih stabil secara politik setelah Pemilu 2004 (era Presiden SBY).
- Tantangan keamanan bergeser: dari konflik komunal ke **terorisme**, separatisme, dan kejahatan transnasional.
- Polri makin mendapat sorotan internasional setelah sukses membongkar jaringan teroris pasca **Bom Bali I (2002)** dan **Bom JW Marriott (2003)**.
- Tuntutan reformasi Polri makin menguat, terutama transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Arah Kebijakan dalam Renstra

- **Visi:** Polri yang profesional, bermoral, dan modern.
- **Misi utama:**
 1. Konsolidasi kelembagaan pasca pemisahan dari ABRI.
 2. Peningkatan kualitas SDM kepolisian.
 3. Penguatan kapasitas penegakan hukum berbasis HAM.
 4. Modernisasi peralatan dan teknologi kepolisian.
 5. Peningkatan citra dan kepercayaan masyarakat.

4. Keberhasilan

1) Penanggulangan Terorisme

- Bom Bali II (2005) menewaskan 23 orang dan melukai ratusan; Polri (Densus 88) berhasil menewaskan Dr. Azhari Husin (2005) dan melemahkan jaringan Noordin M. Top.
- Menurut data BNPT, periode 2000–2009 Polri menangani sekitar 470 tersangka terorisme, sebuah capaian yang diakui secara global.

2) Konflik & Perdamaian Aceh

- Pasca **MoU Helsinki (2005)**, Polri berperan besar menjaga keamanan, dengan penurunan drastis insiden kekerasan.
- Sebelumnya, konflik Aceh (1976–2005) menelan lebih dari 15.000 korban jiwa.

3) Modernisasi & Kapasitas Teknis

- Anggaran meningkat dari Rp 16 triliun (2005) menjadi Rp 27 triliun (2009).
- Peningkatan dialokasikan untuk IT kepolisian, laboratorium forensik, dan peralatan taktis.

4) Peningkatan Kepercayaan Publik

- Survei LSI (2006): Polri dipercaya hanya 36% responden.
- Survei Indobarometer (2008): naik menjadi 43–45%, terutama karena keberhasilan kontra-terorisme.

5. Tantangan / Kelemahan

1) Kasus HAM & Pelanggaran Aparat

- Amnesty International (2006) mencatat praktik penyiksaan masih sering terjadi.
- Komnas HAM menerima 700-900 aduan per tahun terkait tindakan Polri (2005-2009).
- Penanganan kasus Munir (2004-2008) dinilai lamban dan tidak menyentuh aktor intelektual.

2) Korupsi & Pungli

- KPK (2008) dan ICW (2007-2009) menempatkan kepolisian sebagai institusi yang rawan pungli (SIM, tilang, SKCK).

3) Citra Publik Belum Stabil

- Meski kepercayaan publik naik, Polri tetap tertinggal jauh dari TNI (60-70%).
- Korupsi, kekerasan aparat, dan pelayanan buruk terus menggerus citra positif.

6. Analisis

Periode 2005-2009 menandai fase penting konsolidasi kelembagaan Polri pasca-pemisahan dari ABRI. Pada fase ini, Polri mampu menunjukkan **kapasitas operasional** yang signifikan, terutama dalam penanggulangan terorisme. Keberhasilan Densus 88 membongkar jaringan pelaku Bom Bali II (2005) serta menumpas tokoh penting seperti Dr. Azhari dan Noordin M. Top menempatkan Polri dalam sorotan global, sekaligus membuka akses terhadap kerja sama internasional di bidang teknologi, pelatihan, dan

intelijen. Selain itu, keterlibatan Polri dalam menjaga perdamaian pasca **MoU Helsinki 2005** memperkuat peran sebagai aktor kunci dalam stabilisasi keamanan domestik.

Namun demikian, capaian ini berjalan beriring dengan sejumlah kelemahan mendasar. **Akuntabilitas penegakan hukum** masih menjadi titik lemah, terlihat dari lambannya penyelesaian kasus pembunuhan Munir dan belum tuntasnya pertanggungjawaban atas kasus pelanggaran HAM di Papua. Sementara itu, **korupsi dan pungli** tetap mencoreng pelayanan publik, menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan tidak serta-merta mengikis praktik budaya lama. Modernisasi peralatan memang dimulai, tetapi **keterbatasan teknologi informasi dan basis data kriminal** menghambat efektivitas penegakan hukum yang berbasis bukti ilmiah.

Dari sisi citra, Polri menghadapi paradoks: keberhasilan kontra-terorisme mendongkrak kepercayaan publik, tetapi kasus korupsi, kekerasan aparat, dan buruknya layanan sehari-hari menggerus kembali legitimasi yang baru dibangun. Hal ini menandakan bahwa **reformasi struktural dan teknis** relatif berhasil, tetapi **reformasi kultural dan etika profesi** masih tertinggal jauh.

Dengan demikian, periode ini dapat dibaca sebagai **fase konsolidasi yang asimetris**: Polri kuat dalam operasi keamanan strategis, tetapi rapuh dalam membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Tantangan terbesar bukan lagi sekadar kelembagaan, melainkan transformasi budaya organisasi agar profesionalisme

tidak hanya terukur lewat operasi besar, melainkan juga melalui interaksi sehari-hari dengan masyarakat.

C. Renstra Polri 2010–2014: Modernisasi & Ujian Akuntabilitas

1. Kapolri

- Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (hingga Oktober 2010).
- Jenderal (Pol) Timur Pradopo (2010–2013) → menghadapi konflik KPK–Polri serta kasus HAM (Mesuji, demonstrasi).
- Jenderal (Pol) Sutarman (2013–2015) → masa transisi menjelang pemerintahan Presiden Jokowi.

2. Konteks Sosial Politik

Periode ini berlangsung di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II dengan stabilitas politik relatif lebih baik. Namun, tuntutan reformasi Polri semakin keras, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Sejumlah kasus besar seperti konflik “**Cicak vs Buaya**” (KPK–Polri), skandal rekening gendut perwira, dan penanganan demonstrasi secara represif memperburuk citra institusi. Di sisi lain, ancaman keamanan bergeser ke bentuk baru: **terorisme pasca-Noordin M. Top**, kejahatan transnasional (narkotika, perdagangan

manusia, kejahatan siber), dan konflik horizontal berskala lokal.

3. Arah Kebijakan Renstra

- **Visi:** Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.
- **Fokus utama:**
 1. Modernisasi organisasi, sarana-prasarana, dan teknologi informasi.
 2. Reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi.
 3. Penguatan penegakan hukum berbasis HAM.
 4. Peningkatan kepercayaan publik melalui pelayanan prima.
 5. Penguatan community policing (Polmas).

4. Keberhasilan

1) Kontra-Terrorisme

- Noordin M. Top tewas dalam operasi Polri (2009), jaringan teror semakin melemah.
- 2010–2014: Polri menangani serangan kecil (misalnya Cirebon 2011, Solo 2012), dengan pelaku cepat ditangkap.
- Data BNPT menunjukkan lebih dari 200 tersangka teroris ditangkap/ditindak pada periode ini.

2) **Modernisasi Teknologi & Peralatan**

- Uji coba **E-Tilang** (2010–2011).
- Pengembangan **Integrated Criminal Justice System (ICJS)** berbasis IT.
- Peningkatan laboratorium forensik, termasuk pembentukan unit siber.

3) **Peningkatan Kapasitas SDM**

- Kerja sama pelatihan dengan Australia, AS, dan negara-negara Eropa dalam bidang kontra-terorisme & investigasi.
- Pendidikan berbasis HAM mulai diintegrasikan lebih serius dalam kurikulum.

4) **Peningkatan Anggaran**

- 2010: sekitar Rp 27,6 triliun.
- 2014: meningkat menjadi Rp 47,3 triliun.

5) **Kepercayaan Publik**

- LSI (2011): tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sekitar 47%.
- Indobarometer (2014): meningkat menjadi sekitar 52%.

5. **Tantangan / Kelemahan**

1) **Kasus Besar yang Mencoreng Citra**

- Konflik **Cicak vs Buaya** (2009–2012) memperkuat persepsi publik bahwa Polri anti-pemberantasan korupsi.

- Kasus **rekening gendut perwira Polri** (2010) semakin menurunkan kepercayaan publik.

2) **Kekerasan Aparat**

- **Tragedi Mesuji (2011)**: aparat diduga melakukan pembunuhan di luar hukum.
- Amnesty International (2012) mencatat penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan demonstrasi.
- Komnas HAM menerima 800–1.000 aduan per tahun terkait tindakan Polri sepanjang 2010–2014.

3) **Korupsi & Pungli**

- Transparency International Indonesia (2013) menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga paling korup menurut persepsi publik.
- ICW (2010–2014) menyebut pungli di layanan SIM, tilang, dan SKCK sebagai praktik korupsi paling dirasakan masyarakat.

4) **Community Policing (Polmas) Minim Dampak**

- Polmas masih sebatas jargon; implementasi di lapangan belum konsisten.

5) **Kepercayaan Publik Tertahan**

- Meski meningkat hingga kisaran 50%, Polri masih jauh di bawah TNI yang memperoleh kepercayaan 70–80%.

6. Analisis

Renstra 2010–2014 menampilkan paradoks reformasi Polri. Dari sisi teknis dan operasional, Polri berhasil menunjukkan kemajuan signifikan melalui modernisasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta keberhasilan kontra-terorisme. Anggaran yang melonjak hampir dua kali lipat memberi ruang bagi penguatan infrastruktur kepolisian. Kepercayaan publik pun menunjukkan tren naik meski perlahan.

Namun, kemajuan ini dibayangi oleh **defisit akuntabilitas**. Konflik terbuka dengan KPK, kasus rekening gendut, serta praktik kekerasan aparat memperkuat citra negatif bahwa reformasi birokrasi belum menyentuh akar persoalan: budaya korupsi, impunitas, dan profesionalisme aparat dalam menghadapi masyarakat. Community policing yang diharapkan menjadi jembatan dengan publik tidak berjalan efektif, sehingga kenaikan kepercayaan masyarakat tetap terbatas.

Secara keseluruhan, periode ini dapat dipahami sebagai **fase modernisasi dengan ujian akuntabilitas**. Polri semakin modern dalam struktur dan teknologi, tetapi masih kesulitan membangun legitimasi moral di mata masyarakat. Dengan kata lain, Polri modern dalam rupa, tetapi belum sepenuhnya dipercaya dalam praktik.

D. Renstra Polri 2015–2019: “Promoter” (Profesional, Modern, Terpercaya)

1. Kapolri

- **Jenderal Pol. Badrodin Haiti (2015–2016)** → masa awal pemerintahan Presiden Jokowi, fokus pada konsolidasi internal dan stabilisasi pasca transisi kekuasaan.
- **Jenderal Pol. Tito Karnavian (2016–2019)** → membawa visi *Promoter* (Profesional, Modern, Terpercaya), dengan prioritas pada modernisasi layanan publik dan kontra-terorisme.

2. Konteks Sosial Politik

Periode ini berlangsung pada **era Presiden Joko Widodo jilid I**, ditandai dengan dua dinamika besar:

- **Stabilitas politik nasional** relatif terjaga, tetapi penuh ketegangan menjelang Pilkada serentak (2015, 2017, 2018) dan Pemilu 2019.
- **Ancaman keamanan baru** muncul dalam bentuk **terorisme perkotaan** (bom Thamrin 2016), meningkatnya **kejahatan siber** (hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring), serta **konflik sosial berbasis identitas** yang menguji kapasitas netralitas Polri. Tekanan publik terhadap reformasi Polri semakin besar, terutama terkait akuntabilitas HAM, profesionalisme dalam politik elektoral, dan modernisasi pelayanan publik.

3. Arah Kebijakan Renstra

- **Pemberantasan Terorisme** → memperkuat Densus 88 dan kerja sama internasional pasca bom Thamrin.
- **Modernisasi Layanan Publik** → digitalisasi SIM online, e-Tilang, dan SKCK online.
- **Penguatan Fungsi Preventif** → meningkatkan peran **Bhabinkamtibmas** untuk pendekatan preventif ketimbang represif.
- **Pengamanan Agenda Politik** → fokus pada Pilkada serentak 2015, 2017, 2018, dan persiapan Pemilu 2019.
- **Penanganan Kejahatan Siber** → menanggapi maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan kejahatan daring.

4. Keberhasilan

1) Kontra-Terrorisme

- Penanganan cepat serangan bom Thamrin (2016).
- BNPT mencatat lebih dari **500 tersangka teroris ditangkap** sepanjang 2016–2018.

2) Modernisasi Layanan Publik

- SIM online mulai berlaku di 45 Satpas (2018).
- e-Tilang diterapkan di 14 Polda (2018).
- SKCK online menjadi inovasi baru dalam pelayanan kepolisian.

3) Kepercayaan Publik

- Survei LSI (2018): 71% masyarakat percaya pada Polri.
- Lonjakan signifikan dibanding rata-rata 57%

pada periode sebelumnya (2010–2014).

4) Agenda Politik

- Pengamanan Pilkada serentak relatif aman, meskipun konflik lokal tetap terjadi.
- Polri dipandang berhasil menjaga stabilitas menjelang Pemilu 2019.

5. Tantangan / Kelemahan

1) Pelanggaran HAM

- KontraS (2017) mencatat **236 kasus kekerasan oleh aparat**, termasuk 13 korban tewas.

2) Konflik Sosial & Kebebasan Beragama

- Setara Institute (2017) mencatat **213 pelanggaran kebebasan beragama**, sebagian melibatkan aparat yang dinilai tidak netral.

3) Netralitas Politik

- Kritik terhadap dugaan keberpihakan Polri dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu 2019.

4) Kejahatan Siber

- Meski ada unit khusus, penyebaran hoaks politik 2017–2019 menunjukkan kapasitas siber Polri masih tertinggal dari eskalasi ancaman.

6. Analisis

Renstra 2015–2019 menandai fase baru reformasi Polri dengan fokus pada **modernisasi layanan dan digitalisasi**. Program *Promoter* yang digagas Jenderal Tito Karnavian memberi identitas baru bagi Polri, mempertegas orientasi pada profesionalisme,

transparansi, dan pelayanan publik. Capaian nyata terlihat dari meningkatnya kepercayaan publik, yang mencapai level tertinggi sejak reformasi.

Namun, **prestasi modernisasi tidak serta-merta menghapus persoalan klasik**. Kasus pelanggaran HAM, praktik kekerasan aparat, dan dugaan keberpihakan dalam politik elektoral tetap menjadi bayang-bayang yang mengurangi legitimasi moral Polri. Penanganan kejahatan siber juga menunjukkan ketertinggalan dari laju perkembangan teknologi dan dinamika politik digital.

Secara keseluruhan, periode ini dapat disebut sebagai **fase “Promoter”: modern dalam layanan, lebih dipercaya publik, namun masih diuji oleh integritas dan netralitas politik**. Polri mulai diterima sebagai institusi modern, tetapi reformasi budaya organisasi dan akuntabilitas HAM masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

E. Renstra Polri 2020–2024: Transformasi “Presisi”

1. Kapolri

- **Jenderal Pol. Idham Azis (2019–2021)** → fokus pada konsolidasi internal dan pengamanan pandemi COVID-19.
- **Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (2021–sekarang)** → memperkenalkan program **Presisi** (*Prediktif, Responsibilitas, Transparansi,*

Berkeadilan), sebagai arah baru reformasi Polri di era digital.

2. Konteks Sosial Politik

Periode ini berlangsung dalam situasi penuh dinamika:

- **Pandemi COVID-19 (2020–2022)** menuntut Polri berperan langsung menjaga ketertiban, distribusi bansos, dan vaksinasi massal.
- **Era digitalisasi cepat** melahirkan ancaman baru berupa kejahatan siber (penipuan daring, hoaks politik, judi online, ransomware).
- **Stabilitas politik** relatif terjaga dengan agenda besar Pilkada serentak 2020 dan persiapan Pemilu 2024.
- Tekanan publik terhadap Polri semakin keras pasca kasus besar internal (Sambo 2022), yang mengguncang citra dan kepercayaan masyarakat.

3. Arah Kebijakan Renstra

- **Penguatan Digitalisasi** → memperluas layanan berbasis daring (SIM online, SKCK online, aplikasi “Polri Super Apps”).
- **Penanganan Pandemi COVID-19** → dukungan penuh terhadap PPKM, vaksinasi, hingga distribusi bantuan sosial.
- **Reformasi Internal** → transparansi rekrutmen, pengawasan berbasis aplikasi **Propam Presisi**, dan evaluasi kinerja anggota.
- **Pengamanan Politik** → menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2020 dan Pemilu 2024.

- **Pemberantasan Kejahatan Siber** → fokus pada hoaks, penipuan daring, judi online, dan ancaman digital lainnya.

4. Keberhasilan

1) Pandemi COVID-19

- Lebih dari **400 ribu personel Polri** dikerahkan untuk mendukung PPKM, vaksinasi, dan distribusi bansos (2020–2022).

2) Digitalisasi Layanan

- Tahun 2022, lebih dari **3 juta pengguna terdaftar** di aplikasi *Polri Super Apps*.

3) Kontra-Terrorisme

- BNPT & Densus 88 menangkap lebih dari **1.100 tersangka teror (2020–2023)**, angka tertinggi pasca 2002.

4) Kepercayaan Publik (awal periode)

- Survei Indikator Politik (2021): **82% masyarakat percaya Polri**, terutama karena sukses pengamanan Pilkada 2020 dan vaksinasi nasional.

5. Tantangan / Kelemahan

1) Kasus Etika & Integritas

- **Kasus Sambo (2022)**: pembunuhan Brigadir J mengguncang wibawa Polri, menurunkan kepercayaan publik menjadi **54% (Litbang Kompas, Okt 2022)**.
- **Kasus Teddy (2022)**, dugaan keterlibatan anggota dalam **judi online, narkoba, dan**

pelanggaran disiplin memperburuk citra.

2) Penegakan HAM

- o Kritik terkait penanganan **demonstrasi Omnibus Law 2020** dan aksi unjuk rasa lainnya yang dinilai represif.

3) Kejahatan Siber

- o Lonjakan laporan kasus siber → lebih dari **8.000 kasus ditangani Bareskrim pada 2022**, menunjukkan kapasitas belum seimbang dengan skala ancaman.

6. Analisis

Renstra 2020–2024 menandai **era digitalisasi total Polri** dengan visi *Presisi*. Layanan publik berbasis daring dan penanganan pandemi menegaskan peran Polri sebagai institusi yang adaptif terhadap tantangan baru. Tingginya angka keberhasilan kontra-terorisme semakin memperkuat aspek operasional.

Namun, **prestasi ini runtuh sementara akibat krisis integritas internal** yang meledak dalam kasus Sambo. Kepercayaan publik yang sempat mencapai titik tertinggi turun drastis, memperlihatkan rapuhnya reformasi budaya organisasi.

Dengan semakin dekatnya **Pemilu 2024**, tantangan terbesar Polri adalah **membuktikan netralitas, mengembalikan legitimasi moral, dan memperkuat integritas internal** agar transformasi *Presisi* tidak sekadar digital, tetapi juga menyentuh akar budaya organisasi.

Tabel 1. Peta Jalan Reformasi Polri (1999-2024)

Periode Renstra	Kapolri	Konteks Sosial Politik	Arah Kebijakan	Keberhasilan	Tantangan / Kelemahan
1999–2004 Fase Awal Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> • Roesman-hadi, Bimantoro, • Da'i Bachtiar 	Pemisahan dari ABRI (1999), UU No. 2/2002, konflik Timtim, Ambon, Poso, Aceh	Bangun identitas sipil, restrukturisasi organisasi, neutralitas pemilu	UU No. 2/2002, pembentukan Densus 88 (2003), netralitas Pemilu, awal pendidikan HAM	Citra publik buruk, pelanggaran HAM (Aceh, Papua), keterbatasan teknologi, kasus Munir, korupsi & pungli
2005–2009 Konsolidasi Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Da'i Bachtiar, Sutanto, • Bambang H. Danuri 	Stabilitas era SBY I, fokus pada terorisme & separatisme, tuntutan reformasi	Profesional, bermoral, modern; penguatan SDM & teknologi	Sukses kontra-teror (Azhari, Noordin), dukungan global, MoU Helsinki (Aceh), modernisasi forensik, SDM berbasis HAM	Kasus Munir tidak tuntas, Wasior–Wamena membayangi, korupsi & pungli, kekerasan aparat, citra publik fluktuatif

2010–2014 Modernisasi & Ujian Akunt- abilitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Bambang H. Danuri, ● Timur Pradopo, ● Sutarman 	Era SBY II, konflik KPK–Polri (“Cicak vs Buaya”), kasus rekening gendut, tuntutan transparansi	Profesional, modern, terpercaya; modernisasi IT, community policing, pelayanan prima	Kontra-teror: 200+ tersangka ditangkap, e-Tilang uji coba, ICJS, cybercrime unit, anggaran meningkat, kepercayaan publik naik 50%	Konflik KPK–Polri, rekening gendut, kekerasan aparat (Mesuji, demo), pungli & korupsi, Polmas belum efektif
2015–2019 Modernisasi & Promoter	<ul style="list-style-type: none"> ● Badrodin Haiti, ● Tito Karnavian 	Era Jokowi I, bom Thamrin 2016, Pilkada serentak, meningkatnya hoaks & konflik politik	“Promoter” (Profesional, Modern, Terpercaya), digitalisasi SIM, e-Tilang, penguatan Bhabinkamtibmas, kejahatan siber	Penanganan cepat bom Thamrin, 500+ tersangka teror ditangkap, SIM online, SKCK online, e-Tilang, kepercayaan publik naik ke 71% (2018)	Pelanggaran HAM (236 kasus 2017), netralitas politik diper-tanyakan, konflik sosial-agama, kapasitas siber belum sebanding ancaman

2020–2024 Digitalisasi Presisi	<ul style="list-style-type: none"> • Idham Azis, • Listyo Sigit Prabowo 	<p>Pandemi COVID-19, Pilkada 2020, persiapan Pemilu 2024, ledakan kasus siber, kasus Sambo 2022</p>	<p>“Presisi” (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan), digitalisasi total, pengutan Propam, pengamanan politik</p>	<p>Pengamanan pandemi (400 ribu personel), 3 juta pengguna <i>Super Apps</i>, 1.100 tersangka teror ditangkap (2020–2023), kepercayaan publik sempat 82% (2021)</p>	<p>Kasus Sambo turunkan kepercayaan publik jadi 54% (2022), judi online & narkoba melibatkan aparat (kasus Teddy), pendekatan represif demo, 8.000+ kasus siber (2022)</p>
--------------------------------------	---	---	---	---	--

III. Analisis Menyeluruh Transformasi Polri (1999–2024)

A. Pola Keberhasilan

1. Konsistensi Reformasi Hukum dan Kelembagaan
 - Pemisahan Polri dari ABRI (1999) diikuti payung hukum *lex specialis* (UU No. 2/2002).
 - Polri berhasil membangun sistem pendidikan, rekrutmen, dan struktur organisasi sipil meski masih dalam bayang-bayang militeristik.
2. Keberhasilan Kontra-Terrorisme
 - Dari Densus 88 (2003) hingga operasi terintegrasi era *Presisi*, Polri konsisten menjadi garda depan penanggulangan terorisme.
 - Polri mampu mengimbangi perubahan pola serangan teror, dari bom besar (awal 2000-an) ke aksi lone wolf (2010–2020).
3. Modernisasi Teknologi dan Pelayanan Publik
 - Digitalisasi administrasi (SIM online, SKCK online, e-Tilang, *Super Apps Presisi*) menunjukkan kemampuan adaptif Polri.
 - Inovasi ini berdampak langsung pada persepsi publik: kepercayaan masyarakat meningkat signifikan pada 2015–2021.
4. Kapasitas Respons Krisis
 - Polri terbukti mampu mengamankan momentum besar: pemilu, konflik lokal, bencana, hingga

pandemi COVID-19.

- o Pengerahan ratusan ribu personel saat pandemi menunjukkan fleksibilitas fungsi Polri dalam krisis nasional.

B. Pola Kegagalan yang Berulang

1. Masalah Integritas dan Budaya Internal

- o Kasus rekening gendut (2010), praktik pungli, judi online, narkoba, hingga kasus Sambo (2022) menegaskan pola korupsi dan *abuse of power* yang berulang.
- o Reformasi kultural sering tertinggal dibanding reformasi struktural atau teknologi.

2. Pelanggaran HAM dan Kekerasan Aparat

- o Pola kekerasan di Papua, konflik horizontal (Ambon, Poso, Mesuji, demo mahasiswa), menunjukkan berulangnya pendekatan represif.
- o Pelanggaran HAM berat pasca-reformasi tidak pernah tuntas di ranah hukum nasional, hanya bergeser bentuk dan aktornya.

3. Politik dan Netralitas

- o Dari pemilu ke pemilu, isu keterlibatan atau keberpihakan Polri terus muncul (2004, 2014, 2019, 2024).
- o Netralitas Polri masih dipersepsikan rapuh, terutama karena kedekatan personal Kapolri dengan rezim berkuasa.

4. Kapasitas Siber Tertinggal dari Ancaman

- Meski ada unit siber, peningkatan kasus hoaks, judi online, dan penipuan digital menunjukkan adaptasi Polri belum seimbang dengan eskalasi ancaman digital.

C. Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal

- Budaya Organisasi: Warisan militeristik masih kental → pola represif, komando vertikal kuat, namun kurang akuntabilitas.
- Integritas Personel: Masalah korupsi, pungli, narkoba, dan kasus Sambo menunjukkan lemahnya *internal control system*.
- Kepemimpinan Kapolri: Setiap Kapolri membawa jargon baru (*Promoter, Presisi*), tapi kesinambungan reformasi kurang konsisten.
- Sumber Daya dan Teknologi: Modernisasi ada, tapi belum merata; kesenjangan antara pusat dan daerah masih besar.

Faktor Eksternal

- Dinamika Politik Nasional: Hubungan Polri dengan Presiden/parpol berpengaruh pada netralitas dan independensi institusi.
- Perubahan Ancaman Keamanan: Dari konflik komunal (1999–2004), terorisme (2005–2015), hingga kejahatan siber dan disinformasi (2016–2024).

- Tuntutan Publik & Masyarakat Sipil: Tekanan dari media, LSM, dan publik memaksa Polri lebih transparan, meski resistensi internal sering muncul.
- Globalisasi & Teknologi: Kejahatan lintas negara (narkoba, human trafficking, cybercrime) menuntut kolaborasi global, yang tak selalu diimbangi kapasitas Polri.

D. Analisis SWOT Polri (2000–2025)

1. Strengths (Kekuatan)

- **Transformasi institusional:** Pemisahan dari ABRI (2000) memberi dasar hukum (UU No.2/2002) untuk Polri sebagai institusi sipil.
- **Kapabilitas penegakan hukum:** Keberhasilan Densus 88 menindak terorisme (Bom Bali 2002, jaringan JI, ISIS) → citra profesional di mata internasional.
- **Modernisasi layanan:** Digitalisasi (SIM online, e-Tilang, Polri Super Apps 2020–2024, 4,9 juta pengguna) meningkatkan aksesibilitas.
- **Kapasitas operasi besar:** Polri terbukti mampu mengamankan Pemilu, operasi premanisme (2025: 3.326 kasus tuntas), dan event internasional.
- **Kepercayaan publik relatif terjaga:** Survei Indikator & LSI menunjukkan Polri kerap berada di 3 besar lembaga paling dipercaya (puncak 71% pada 2018, rebound 2025).

2. Weaknesses (Kelemahan)

- **Pelanggaran HAM berulang:** Aduan Komnas HAM (2000–2024 ratusan kasus) → pola kekerasan dalam penanganan demonstrasi & konflik daerah.
- **Integritas & korupsi:** Kasus besar (Rekening Gendut, kasus Sambo, kasus Teddy) mencoreng citra dan membuka krisis kepercayaan.
- **Kultur militeristik:** Meski terpisah dari ABRI, pola komando dan pendekatan represif masih membayangi.
- **Ketergantungan politik:** Polri rentan dipersepsikan dekat dengan kekuasaan (kasus Pilkada, penegakan hukum selektif).
- **Profesionalisme SDM belum merata:** Disparitas kualitas di pusat dan daerah, khususnya soal kapasitas digital dan integritas.

3. Opportunities (Peluang)

- **Teknologi digital & AI:** Big data, analitik kriminal, dan aplikasi layanan publik bisa mendorong transparansi.
- **Kerja sama internasional:** Dukungan ASEAN, Interpol, dan mitra global untuk kejahatan transnasional & terorisme.
- **Desentralisasi & peran masyarakat sipil:** Partisipasi publik dalam pengawasan bisa memperkuat akuntabilitas.
- **Generasi baru kepemimpinan:** Momentum regenerasi pimpinan pasca-Sambo dapat membuka peluang reformasi kultur.

- **Agenda nasional 2045:** Visi Indonesia Emas membuka ruang bagi Polri untuk menjadi institusi modern, humanis, dan dipercaya.

4. Threats (Ancaman)

- **Kepercayaan publik fluktuatif:** Lonjakan krisis kepercayaan (turun drastis 2022 → 54%) bisa terulang bila kasus besar mencuat.
- **Kejahatan siber & transnasional:** Peningkatan cybercrime, narkoba jaringan internasional, dan perdagangan manusia → menuntut kapasitas tinggi.
- **Politisasi & intervensi kekuasaan:** Risiko Polri dimanfaatkan untuk kepentingan politik, terutama menjelang Pemilu.
- **Radikalisme & terorisme:** Ancaman ideologi kekerasan tetap ada, meski jaringan besar telah dilemahkan.
- **Resistensi internal:** Reformasi sering tersendat karena kultur lama, resistensi aparat, dan kepentingan elite internal.

Ringkasan SWOT 2000–2025

Polri telah membangun pondasi **kekuatan struktural** (institusi sipil, digitalisasi, kapasitas operasi) dan memiliki **peluang transformasi** melalui teknologi, kerja sama global, dan dukungan masyarakat. Namun, **kelemahan mendasar** (pelanggaran HAM, integritas, kultur militeristik) dan **ancaman eksternal** (politik, kejahatan transnasional, fluktuasi kepercayaan

publik) menjadi faktor penentu yang harus diatasi dalam peta jalan reformasi ke depan.

E. Kesimpulan Analisis

Polri 1999–2024 menunjukkan pola keberhasilan dalam reformasi struktural dan modernisasi teknologi, terutama di bidang kontra-terorisme dan pelayanan publik. Namun, pola kegagalan berulang selalu muncul di ranah budaya organisasi, integritas personel, dan akuntabilitas HAM. Faktor internal berupa budaya militeristik dan lemahnya pengawasan memperkuat masalah, sementara faktor eksternal berupa dinamika politik dan perubahan ancaman membuat Polri kerap reaktif, bukan proaktif.

IV. Kondisi Umum Indonesia 2025 (Pemotretan Singkat)

A. Politik & Pemerintahan

- Presiden sekarang **Prabowo Subianto**. Pemerintahannya menerima tekanan publik kuat terkait kebijakan anggaran, transparansi, dan penggunaan wewenang lembaga keamanan.
- Terjadi gelombang protes rakyat atas berbagai isu:
 - Perdebatan dan kekhawatiran publik atas revisi Undang-Undang TNI/Law TNI yang memperluas peran militer dalam urusan sipil dan memperpanjang usia pensiun perwira aktif.
 - Isu tunjangan besar anggota DPR (housing allowance sebesar Rp50 juta per bulan) memicu kemarahan publik.
 - Kritik terhadap penggunaan kekuasaan aparat keamanan dalam merespon protes publik, termasuk klaim-klaim penanganan represif.
- Perombakan kabinet dan posisi strategis dilakukan sebagai respons terhadap protes dan tuntutan publik. Contohnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan, dan ditunjuk Menteri Koordinasi Politik-Kehukuman-Keamanan baru yaitu mantan jenderal sebagai upaya stabilitas politik dan keamanan.

B. Ekonomi

- Pemerintah sedang mengupayakan stimulus ekonomi untuk meredam tekanan terhadap masyarakat terdampak (inflasi, harga energi & pangan). Bantuan pangan dan pekerjaan menjadi prioritas. (Catatan: beberapa laporan menyebut resistensi terhadap anggaran stimulus karena kekhawatiran defisit dan tekanan fiskal.)
- Defisit fiskal diperkirakan meningkat seiring target pertumbuhan yang ambisius dan kebijakan penggunaan anggaran yang besar untuk agenda keamanan dan sosial. Bank sentral ikut dipertimbangkan dalam mendukung pertumbuhan, tetapi juga harus menjaga stabilitas moneter. (Laporan-monitor pasar modal & investor menyebut tekanan nilai tukar dan pasar saham saat protes merembet ke ekonomi.)
- Harga kebutuhan pokok dan inflasi tetap menjadi beban masyarakat, khususnya di kota-kota besar. Keluhan atas subsidi yang dirasa kurang memadai dan disparitas biaya hidup terus menjadi pemicu protes.

C. Keamanan dan Ketertiban

- Gelombang protes sudah meluas: protes menolak RUU TNI, protes terhadap tunjangan legislatif, serta protes atas tindakan aparat keamanan (seperti

kendaraan polisi yang menabrak warga, tindakan gas air mata, dll.).

- Penumpas protes sering memakai taktik keamanan seperti water cannon, gas air mata, penahanan massal, yang menjadi sorotan lembaga HAM dan media.
- Di satu sisi, Polri menunjukkan performa yang baik di beberapa layanan spesifik: misalnya **kepuasan publik terhadap layanan lalu lintas Polri** meningkat hingga ~94.9 %.

D. Kepercayaan Publik & Persepsi

- Survey LSI (Februari 025) kepercayaan masyarakat terhadap Polri paling rendah (71%) dibandingkan penegak hukum lain (Kejaksaan Agung tinggi 77%; Pengadilan 73%; KPK 72%).
- Survei terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri rendah dibanding lembaga negara lainnya. Misalnya survei IPO Mei 2025: Polri hanya dipercaya oleh sekitar **46,6%** masyarakat.
- Kritik tetap muncul terkait integritas aparat, penggunaan kekuasaan saat demonstrasi, dan kekhawatiran bahwa peran militer semakin meluas ke ranah sipil.

E. Fokus Prioritas Pemerintah & Isu Keamanan

- Pemerintah dan Polri makin sering koordinasi dengan BIN (Badan Intelijen Negara) terkait situasi politik-keamanan terkini, terutama menyikapi protes-protes dan potensi kerusuhan. (Data: operasi keamanan diperketat, penutupan akses publik di area DPR, pengecekan dan razia keamanan di beberapa kota besar)
- Revisi UU TNI menjadi isu strategis: UU yang disahkan Maret 2025 memberi wewenang lebih besar kepada personel militer untuk memegang jabatan sipil tertentu, yang memicu keraguan publik soal pemisahan peran sipil-militer.

F. Tantangan Spesifik bagi Polri di 2025

Berdasarkan pemotretan ini, berikut adalah tantangan utama yang harus dihadapi Polri:

1. Mengelola Ekspektasi Publik Tinggi terhadap Reformasi & Keadilan

Publik menuntut tidak hanya kebijakan baru, tetapi bukti nyata: transparansi anggaran, penghapusan obsolete privileges legislatif, pertanggungjawaban atas kasus aparat yang melanggar.

2. Menjaga Kepercayaan Publik di Tengah Kontroversi Aparat

Kasus tegas seperti kecelakaan oleh kendaraan aparat, tindakan represif terhadap demonstran,

dan hukum tindak kekerasan aparat bisa sangat merusak persepsi publik.

3. Menjaga Netralitas Polri dalam Politik yang Semakin Partisan

Dengan revisi UU TNI dan posisi-personel militer di ranah sipil, Polri harus mengklarifikasi perannya agar tak tercampur lembaga militer dan tetap independen dalam urusan politik.

4. Efisiensi Anggaran dan Penyesuaian Kebijakan Ekonomi

Pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang meningkat. Polri perlu menunjukkan bahwa operasionalnya efektif dan bahwa penggunaan anggaran keamanan & pelayanan publik dikendalikan serta transparan.

5. Meningkatkan Respons terhadap Kejahatan Siber dan Digital

Ancaman digital seperti hoaks, ujaran kebencian, penipuan online, judi online, dan kasus siber lainnya meningkat pesat. Polri harus memperkuat unit siber, sistem pelaporan, litigasi digital, dan literasi publik.

6. Menjadi Agen Reformasi Hak Asasi Manusia & Etika Profesi

Jangan hanya fokus kemampuan operasi dan digitalisasi, tetapi juga bagaimana memperlakukan demonstrasi, menangani protes damai, dan memperhatikan HAM agar tak kembali ke praktik pelanggaran.

V. Analisis Renstra Polri 2025–2029

A. Pokok-pokok Isi Renstra

Beberapa poin penting yang muncul dalam Renstra 2025-2029:

- **Visi Polri: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Aman, Tertib, dan Berkeadilan, melalui kepolisian yang berorientasi pada masyarakat.”**
- **Sasaran strategis termasuk:**
 1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban yang Responsif dan Prediktif
 2. Penegakan Hukum yang Masyarakat Rasional, Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan
 3. Pengelolaan SDM yang adaptif, kompeten, berintegritas secara terpadu dan optimal
 4. Infrastruktur / Modernisasi alat & sarana-prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital (indikator seperti SPBE, MEPE)
 5. Tata Kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang terbuka (pengaduan masyarakat, transparansi pelayanan)
- **Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penunjang (IKP) diusulkan, di antaranya: indeks profesionalitas SDM, indeks kompetensi diklat, pengembangan kapasitas SDM, pemenuhan Alkom / Almatrus**

(alat peralatan khusus), indeks kualitas data, dan kepuasan layanan publik.

B. Pola Keberhasilan yang Diharapkan

Dari dokumen Renstra dan konteks sebelumnya, berikut pola keberhasilan yang sangat memungkinkan terjadi:

1. Perkuatan orientasi ke masyarakat

Karena visi menekankan “kepolisian yang berorientasi pada masyarakat”, dan adanya indikator kepuasan layanan, pengaduan masyarakat, serta responsivitas, Polri tampak mau makin dekat ke publik dan merespons kebutuhan riil.

2. Modernisasi sarana dan teknologi lebih terstruktur

Fokus pada SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), alat peralatan khusus, dan pemanfaatan litbang/inovasi menunjukkan bahwa Polri berencana lebih serius memperbarui infrastrukturnya agar relevan dengan tantangan digital dan keamanan modern.

3. SDM sebagai faktor penentu

Pengembangan kompetensi, integritas, dan adaptivitas SDM muncul sebagai sasaran strategis utama. Bila diimplementasikan dengan konsisten, ini bisa menjadi ujung tombak perubahan (budaya dan perilaku aparat).

4. Akuntabilitas dan transparansi menjadi beban yang semakin nyata

Indikator terkait pengaduan masyarakat, tata kelola keuangan, dan budaya pelayanan yang bersih dan terbuka menunjukkan hadirnya tekanan internal dan eksternal agar Polri tidak hanya operasi tetapi juga memenuhi standar etis dan legal.

C. Pola Risiko dan Kegagalan yang Perlu Diwaspadai

Meskipun banyak arah yang positif, Renstra juga membuka kemungkinan risiko dan tantangan, terutama jika beberapa elemen kelemahan lama tidak diperbaiki:

1. Implementasi vs formulasi

Banyak indikator yang diusulkan masih bersifat “usulan awal / draft” (dari dokumen draf/ presentasi). Kesulitan pasti muncul di tahap implementasi: misalnya kesenjangan antara level Mabes dengan wilayah / Polda / Polsek. Bila tidak diikuti penganggaran dan supervisi yang kuat, indikator bisa menjadi angin lalu.

2. Integritas dan budaya internal

Meski ada fokus pada SDM yang berintegritas, tantangan lama seperti korupsi, pelanggaran etika, penggunaan kekuasaan aparat dalam situasi protes atau politik tetap ada. Bila budaya ini tidak

diubah dari akar (pelatihan, reward-punishment, pengawasan internal, Propam, transparansi), target “berkeadilan” bisa sulit tercapai.

3. Keterbatasan sumber daya dan sarana/prasarana di daerah

Banyak daerah belum memiliki peralatan, teknologi, personel yang memadai. Pemenuhan indeks Alkom atau Almitsus harus diperhatikan distribusinya agar bukan hanya pusat yang maju.

4. Resistensi institusional atau budaya organisasi

Reformasi yang menyentuh aspek struktural terkadang masih terhambat karena mind-set lama, hierarki kuat, kurangnya inovasi lokal. Bila indikator dan target Polri 2025-2029 tidak dikejar dengan pelibatan seluruh elemen, ada risiko stagnasi seperti di banyak periode sebelumnya.

5. Ekspektasi publik dan tekanan politik

Publik sekarang lebih kritis, media & lembaga pemantau aktif, dan isu-isu seperti netralitas, tindakan represif, atau kesetaraan pelayanan sangat diperhatikan. Kegagalan kecil bisa menjadi isu besar (kasus Sambo, protes, dll.). Polri harus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak sipil.

6. Ketidakpastian eksternal

Situasi keamanan bisa berubah cepat: konflik sosial-agama, ancaman siber yang makin kompleks, atau tekanan politik domestik. Anggaran dan kebijakan

mungkin perlu fleksibel agar dapat merespons hal-hal tak terduga.

D. Faktor Internal dan Eksternal yang Akan Menentukan Keberhasilan Renstra 2025-2029

Internal:

- Kualitas kepemimpinan di tingkat Mabes → komitmen Kapolri dan pejabat senior untuk meneruskan reformasi kultural dan perilaku aparat.
- Manajemen pengawasan internal: Divisi Propam, SPIP, APIP, dan mekanisme pengaduan masyarakat harus diperkuat, bebas dari intervensi, dan transparan.
- Kompetensi dan moral personel: seleksi, pendidikan, pelatihan yang sesuai visi baru harus dijaga; reward & punishment jelas.
- Ketersediaan sumber daya: anggaran harus cukup, distribusi merata; sarana/prasarana daerah harus dibarengi kemampuan penggunaan dan pemeliharaan.
- Data dan evaluasi: indikator harus didukung data yang valid, pengukuran berkala, monitoring & evaluasi transparan, ada akuntabilitas atas target yang gagal tercapai.

Eksternal:

- Dukungan regulasi dan legislatif: UU, Perkap, Perpol yang relevan perlu disesuaikan agar tidak ada celah hukum bagi penyalahgunaan kekuasaan.
- Respons publik & media: opini publik akan terus jadi pengawas eksternal. Media sosial mempercepat penyebaran kritik.
- Kerjasama antar-lembaga keamanan & pemerintah daerah: keamanan dan ketertiban sebagian besar di daerah, yang memerlukan sinergi Polda dan Polsek dengan Pemda, masyarakat lokal.
- Tantangan teknologi & lingkungan: kejahatan siber, hoaks, disinformasi, ancaman keamanan baru perlu diantisipasi secara proaktif.
- Stabilitas politik dan hubungan sipil-militer: revisi UU TNI atau perubahan peran militer/sipil bisa mempengaruhi persepsi netralitas Polri.

E. Kesimpulan / Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi agar Renstra 2025-2029 benar-benar efektif:

1. Pastikan **finalisasi indikator kinerja (IKU/IKP)** dilakukan dengan baseline yang valid dan target

- realistis, serta ada mekanisme evaluasi periodik dan akuntabilitas jika target meleset.
2. Dorong penguatan budaya integritas: jangan hanya “SDM berintegritas” sebagai jargon, tapi pelatihan, reward-punishment, transparansi dalam proses kepegawaian, pengaduan yang mudah dan aman.
 3. Fokus prioritas daerah: berikan perhatian khusus pada Polda / Polsek yang selama ini tertinggal agar modernisasi dan pelayanan publik tidak hanya di kota besar.
 4. Tingkatkan kemampuan siber & digital untuk kejahatan baru: termasuk sistem pelaporan digital, respon cepat terhadap hoaks, keamanan data, literasi digital masyarakat & aparat.
 5. Jaga netralitas institusi: Polri harus secara tegas menjaga jarak dari politisasi, terutama dalam pemilu dan jabatan sipil, agar kepercayaan publik tetap kuat.
 6. Transparansi anggaran & pelayanan: publik harus melihat hasil nyata dari penggunaan anggaran — penanganan pengaduan, laporan keuangan, pelayanan publik yang lebih mudah & adil.

Peta Jalan Reformasi Polri 2025–2045

1. Arah Strategis

- **Transformasi Digital dan Transparansi**
Polri harus menjadikan *Polri Super Apps* dan big data bukan sekadar layanan administratif, melainkan alat integritas. Semua layanan publik (SIM, SKCK, tilang, aduan HAM) harus terintegrasi dengan sistem audit digital yang transparan dan bisa diawasi publik.
- **Reformasi Kultural**
Menghapus kultur militeristik dengan memperkuat pendidikan etika, HAM, dan pelayanan publik sejak pendidikan dasar kepolisian. Regenerasi pimpinan harus diarahkan pada profil yang berintegritas, bukan hanya yang berprestasi operasional.
- **Penguatan Akuntabilitas**
Membentuk mekanisme pengawasan independen yang lebih kuat (dengan partisipasi masyarakat sipil) sehingga kasus besar seperti Sambo tidak terulang dan dapat ditangani secara cepat, terbuka, dan tuntas.
- **Kemitraan Global**
Menjadi pemain aktif dalam kerja sama keamanan regional (ASEAN, Interpol) untuk menghadapi kejahatan transnasional dan siber.

2. Tahapan Peta Jalan

a. Tahap I (2025–2030): Konsolidasi Integritas dan Layanan

- Target: Meningkatkan kepercayaan publik secara konsisten di atas 75% (survei nasional).
- Agenda:
 - Reformasi SDM → kurikulum HAM dan integritas.
 - Integrasi digital layanan (satu data kepolisian).
 - Penguatan Divisi Propam dan pengawasan eksternal independen.

b. Tahap II (2030–2035): Modernisasi Teknologi & Penegakan Hukum

- Target: Polri adaptif menghadapi cybercrime, AI, dan kejahatan lintas negara.
- Agenda:
 - Laboratorium cybercrime nasional.
 - Kerja sama riset dengan universitas dan lembaga global.
 - Sistem *predictive policing* berbasis big data.

c. Tahap III (2035–2040): Reformasi Kultural & Demokratisasi Internal

- Target: Polri berkarakter humanis, responsif, dan terbuka.
- Agenda:
 - Pemisahan lebih jelas fungsi penegakan hukum dan pelayanan publik.

- Penguatan *community policing* (Polisi Masyarakat).
- Peningkatan representasi perempuan dan minoritas dalam kepolisian.

d. Tahap IV (2040-2045): Polri Emas – Institusi Modern & Humanis

- Target: Menjadi institusi dengan kepercayaan publik tertinggi di Asia Tenggara.
- Agenda:
 - Standar operasional setara best practice internasional.
 - Polri menjadi benchmark regional untuk keamanan berbasis HAM.
 - Afirmasi Polri sebagai pilar utama Indonesia Emas 2045.

3. Indikator Keberhasilan

- Survei kepercayaan publik konsisten di atas 75%.
- Penurunan aduan pelanggaran HAM hingga <50 kasus per tahun (Komnas HAM).
- 100% layanan publik berbasis digital dengan akses audit terbuka.
- Kapasitas cybercrime setara dengan negara maju ASEAN.
- Meningkatnya keterwakilan perempuan hingga 30% di semua level Polri.

4. Tantangan Kritis

- Resistensi internal: sebagian aparat masih nyaman dengan kultur lama.
- Politisasi: risiko kedekatan dengan kekuasaan menjelang Pemilu.
- Pendanaan: modernisasi digital dan SDM membutuhkan investasi besar.
- Ketimpangan daerah: layanan digital di kota besar bisa jauh lebih maju dibandingkan daerah 3T.